

TINJAUAN**CARA PANDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN KRISIS
EKOLOGI BERKELANJUTAN**

Veronica A. Kumurur & William M. Nangoy

Staf Pengajar Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado

Abstrak. Krisis ekologi saat ini sangat ditentukan oleh aktifitas manusia melalui pembangunan. Cara pandang yang melahirkan etika dalam melakukan pembangunan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan menjadi penting untuk ditinjau. Cara pandang yang umumnya dianut penyelenggara pemerintahan saat ini, telah mengakibatkan tiga hal penting, yaitu: 1)kegagalan memilih model pembangunan; 2) kegagalan pemerintah dalam memainkan peran sebagai penjaga kepentingan bersama; dan 3) kegagalan pemerintah dalam membangun suatu penyelenggaraan pemerintah yang baik

Kata kunci: etika lingkungan, krisis ekologi

PENDAHULUAN

“Damai dengan Allah Pencipta damai dengan ciptaanNya”, pesan Paus Yohanes Paulus II di suatu perayaan Hari Perdamaian yang bermakna saling menghormati antara sesama makhluk ciptaan Tuhan di planet Bumi. Pesan ini di dukung oleh pernyataan *Ernest Collenbach* dalam buku *Living in The Environment* (Miller 1996), yaitu: *“EARTH’S TEN COMMANDMENTS”*, diantaranya adalah: *“engkau harus bertanggungjawab terhadap perlakuanmu terhadap BUMI, engkau tidak boleh mencuri dari generasi mendatang melalui pemiskinan atau peracunan terhadap BUMI, dan engkau boleh memanfaatkan sumberdaya secara terbatas dan bijaksana”*.

Mungkin ini merupakan interpretasi terhadap pesan Allah bagi manusia ciptaanNya, *“Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah akan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi”*(Kejadian 1:28). Pesan yang diinterpretasikan yang bukan semata-mata hanya untuk menguasai dan mengembangkan, makhluk hidup lain (selain manusia) melainkan ada pesan yang tersirat

bahwa kehidupan manusia sangat bergantung pada alam tempat di mana dia diciptakan, manusia tak dapat berkembang tanpa dukungan alam, sehingga manusia harus mengelola dan menata alam ini dengan baik dan bertanggungjawab.

Namun, apa yang terjadi, cara pandang manusia pada jaman itu, yang keliru memandang dirinya sendiri, alam dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem. Kekeliruan ini bersumber dari etika antroposentrisme atau lebih bermakna sebagai etika androsentrisme yang memandang bahwa manusia sebagai pusat dari alam semesta dan hanya manusialah yang mempunyai harga. Secara sadar diterjemahkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling berkuasa dan boleh melakukan apa saja terhadap alam. Sikap inilah yang melahirkan nafsu eksploitatifnya. Sikap atau cara pandang inilah yang digunakan oleh Barat dan yang bermula dari Aristoteles dan sampai pada filsuf-filsuf moderen saat ini (Anonimous, 1993).

Cara pandang ini, kemudian dikritik oleh cara pandang biosentrisme dan ekosentrisme, di mana kedua cara ini lebih berorientasi pada suatu nilai kehidupan. Di mana alam (selain manusia) secara biologis

dan ekologis, mempunyai status moral yang sama dalam kehidupan di bumi ini, untuk itu harus dihargai dan dilindungi haknya secara sama.

Cara pandang demikian lebih ditekankan lagi oleh cara pandang ekofeminisme, di mana alam (manusia dan makhluk hidup lain) tidak hanya sekedar dijaga nilai kehidupannya, tetapi dijaga berlandaskan kasih sayang, dipedulikan, adanya kesetaraan dan tanggung jawab terhadap kehidupan lain dalam suatu hubungan setara dan harmonis dalam satu komunitas ekologis. Ibarat seorang ibu yang sedang menjaga bayi di rahimnya, selama mengandung, ibu itu selalu merawat memberikan kehidupan bagi bayinya, agar tetap bertahan dan hidup pada waktu dia dilahirkan ke dunia. Dan tentunya, dampaknya adalah sesudah melahirkan bayi dalam keadaan sehat itu, si ibu dalam keadaan sehat juga. Jadi ada timbal balik antara ibu dan janin yang dikandung (Desjardins, 1992). Demikian pula, jika kita merawat alam dengan kasih sayang, peduli (*care*), pasti alam itu akan memberikan dampak positif bagi kehidupan kita manusia

CARA PANDANG MANUSIA DAN KRISIS EKOLOGI

Manusia semakin banyak, cara pandang antroposentrisme masih dominan, malah diperparah dengan mengukur

kemakmuran manusia dengan suatu tingkat pertumbuhan ekonomi. Akhirnya alam yang berada pada posisi yang tetap (tidak bertambah), manusia yang semakin bertambah, mengakibatkan sistem alam semakin tak mampu memberikan dukungan bagi kehidupan semua makhluk hidup di dalamnya dalam meningkatkan taraf hidup manusia.

Salah satu pemberitaan Harian Kompas tanggal 12 Januari 1998, bahwa: "Pertumbuhan Ekonomi melampaui Daya Dukung Bumi", dalam ulasan berita ini adalah sebuah "warning" bagi seluruh umat manusia yang tinggal di bumi ini. Perhatian tersebut dilaporkan oleh "State of The World" melalui analisis tahunannya yang disusun oleh *Worldwatch Institute*, menyatakan bahwa: "Ekonomi global yang tersusun seperti sekarang ini tidak mungkin lagi berkembang lebih lama lagi jika ekosistem yang menjadi gantungannya semakin rusak dengan laju seperti sekarang ini".

Mereka mencontohkan Cina yang saat ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat baik dari sebelumnya, namun merusak ekosistem secara global. Prediksi mereka, jika Cina menggunakan minyak bumi perorang mencapai tingkatan seperti di AS, maka Cina akan membakar 80 juta barel minyak bumi per hari, padahal produksi minyak bumi perhari dunia hanya 64 juta



Gambar 1. Virus-virus yang timbul akibat menurunnya kualitas lingkungan (Sumber: Harian Kompas, 2003)

barel per hari. Data itupun didukung oleh penilaian “keberlanjutan lingkungan” yang dilakukan oleh suatu forum Ekonomi Dunia yang diprakarsai oleh *Yale Center for Environmental Law and Policy Yale University* dimana kedudukan Cina adalah rangking 129 dari 142 negara yang dinilai keberlanjutan lingkungan hidupnya. Informasi ini disampaikan pada rapat tahunan 2002. Urutan yang hampir “paling buncit”, yang artinya keberlanjutan lingkungan di negara ini sudah terancam. Menurut analisa para peneliti dunia bahwa wabah SARS di Cina adalah akibat menurunnya kualitas lingkungan di wilayah tersebut (Gambar 1).

Negara Jepang yang pernah menderita akibat bencana Minamata, satu generasi punah, akibat terkontaminasi dengan racun merkuri yang di hasilkan dari limbah PT. Chiso Corporation. Racun merkuri yang dibuang ke perairan laut, mengakibatkan terkontaminasinya ikan-ikan yang menjadi makanan pokok masyarakat Jepang. Akibat efek terkontaminasi dengan merkuri, sebagian generasi muda Jepang waktu itu di Minamata menjadi idiot.

Semua itu, akibat cara pandang manusia, yang hanya melihat dari sisi manusia sebagai pusat segalanya. Alam dan makhluk hidup lainnya tidak memiliki nilai kehidupan. Beberapa sumber pemantau tentang kondisi bumi menyatakan bahwa terganggunya keberadaan bumi ini paling dominan diakibatkan oleh meledaknya jumlah penduduk dunia. Perkembangan alamiah manusia yang hampir tak kuasa dibendung oleh siapapun. Menurut data populasi dunia 2000 yang diterbitkan oleh *Population Reference Bureau* bulan Juni tahun 2000, melaporkan bahwa pada tahun 2000 negara terbanyak memiliki penduduk adalah Cina (1 milyar 265 juta jiwa), diikuti oleh negara India (1 milyar 2 juta jiwa), United States (276 juta) dan diurutan ke 4 adalah negara Indonesia (212 juta jiwa). Dari data ini diprediksi pada tahun 2050 jumlah penduduk dunia terbanyak akan

dimiliki negara India (1 milyar 628 juta jiwa) diikuti oleh Cina (1 milyar 369 juta jiwa), United States (404 juta jiwa) dan Indonesia masih diposisi ke 4 dengan jumlah penduduknya 312 juta jiwa.

Bagaimana negara Indonesia? jumlah penduduk negara Indonesia di tahun 2050 (312 juta) ini bukanlah hal yang biasa dibandingkan ke 3 negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Mereka memiliki tanah (area lahan) yang cukup luas jika dibandingkan dengan negara Indonesia. Indonesia yang 70%-nya adalah perairan, membuat kondisi negara Indonesia cukup kuatir dengan keberadaan penduduk di masa datang. Lahan yang merupakan sumberdaya alam yang utama menopang keberlanjutan hidup manusia bakal menjadi hal yang kritis dimasa datang (tahun 2050).

Bagaimana dengan kondisi keberlanjutan lingkungan di Indonesia? dalam penilaian forum Ekonomi Dunia yang diprakarsai oleh *Yale Center for Environmental Law and Policy Yale University*, negara kita Indonesia berada pada urutan ke 102, masih lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan negara Cina. Namun, ini adalah urutan yang kritis dan perlu disikapi. Dan ternyata komponen penilaian Keberlanjutan lingkungan hidup bukan saja semata-mata hanya penilaian kondisi sumberdaya alamnya saja, tetapi kinerja pemerintah suatu negara dalam menyelenggarakan negaranya.

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP SAAT INI

Ada hubungan yang erat antara penyelenggaraan pemerintahan negara dengan kualitas lingkungan hidup suatu negara, ini dibuktikan dengan perhitungan indeks keberlanjutan lingkungan yang dilakukan oleh *Yale Center for Environmental Law and Policy Yale University* pada tahun 2002. Sehingga

kualitas lingkungan hidup yang baik mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan suatu negara yang baik pula. Pemerintahan yang baik bergantung pada paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang mensyaratkan empat hal, yaitu (Keraf 2002): (a)pemerintahan itu sendiri benar-benar efektif dalam memerintah; (b)pemerintah itu sendiri tunduk kepada aturan hukum yang berlaku; (c)pemerintah berdiri tegak sebagai wasit dan penjaga aturan hukum; (d)adanya perangkat-perangkat kelembagaan demokrasi yang berfungsi maksimal dan efektif.

Paradigma penyelenggaraan pemerintah yang benar adalah pemerintah memerintah berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat demi menjamin kepentingan bersama seluruh rakyat. Secara kasat mata kondisi penyelenggaraan pemerintahan kita sangat tidak baik, sebagai bukti konkritnya kita bisa melihat kenyataan sekarang, di mana kualitas lingkungan hidup di negara Republik Indonesia ini terus saja menurun. Hal ini dibuktikan dengan mulai langkanya air bersih akibat hilangnya ruang terbuka hijau, hilangnya hutan akibat kebakaran hutan, penebangan hutan sehingga menurunkan debit air danau dan tidak bisa lagi mengairi sawah, atau yang paling tragis adalah terputusnya siklus hidrologi suatu wilayah, sehingga mengakibatkan kekeringan yang hebat.

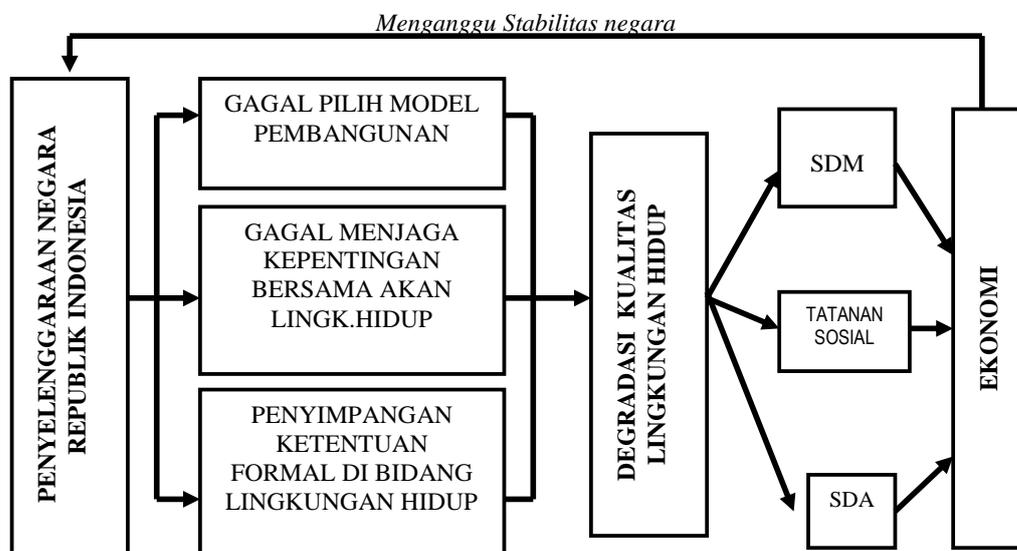
Keadaan ini, bisa disimpulkan akibat kesalahan menyelenggarakan pemerintahan.

Kegagalan pemerintah kita dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia menurut Keraf (2002), adalah: (1)kegagalan memilih model pembangunan, yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dengan segala akibat negatif bagi lingkungan; (2)kegagalan pemerintah dalam memainkan peran sebagai penjaga kepentingan bersama, termasuk kepentingan bersama akan lingkungan hidup; (3)kegagalan pemerintah dalam membangun suatu penyelenggaraan pemerintah yang baik yang menyebabkan penyimpangan terhadap berbagai ketentuan formal di bidang lingkungan.

Kegagalan ini mengakibatkan terus terjadi degradasi lingkungan hidup di Indonesia, yang mengakibatkan terus menurunnya kualitas sumberdaya manusia, memporak-porandakan tatanan sosial, menurunkan kualitas sumberdaya alam dan semuanya itu akan menurunkan kualitas ekonomi. Tentunya ekonomi akan mempengaruhi keberadaan suatu negara atau mengganggu stabilitas suatu negara (Gambar 2).

Kegagalan memilih model pembangunan

Model pembangunan yang dipilih pemerintah RI yang bertitik tolak pada pertumbuhan ekonomi tanpa



Gambar 2. Skema hubungan penyelenggaraan pemerintah, degradasi kualitas lingkungan hidup

memperhitungkan ketersediaan sumber daya alam. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator bagi majunya pembangunan suatu negara.

Dalam istilah ekonomi “pembangunan” biasanya diartikan sebagai kapasitas dari suatu perekonomian nasional, yang kondisi awalnya lebih kurang statis dalam jangka waktu yang cukup lama, untuk berupaya menghasilkan dan mempertahankan kenaikan tahunan produk nasional bruto (Todaro, 1994). Pembangunan pada tahun 1960-an dan tahun 1970-an secara keseluruhan hampir selalu dilihat sebagai fenomena ekonomi, dimana pertumbuhan GNP per kapita yang cepat akan menetes ke bawah (*trickle down*) kepada masyarakat luas dalam bentuk pekerjaan dan kesempatan-kesempatan ekonomi lainnya, atau terciptanya syarat-syarat yang diperlukan bagi distribusi manfaat-manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas. Masalah-masalah seperti kemiskinan, pengangguran, distribusi pendapatan dan pencemaran lingkungan dianggap soal kedua, yang penting adalah menyelesaikan tugas-tugas pertumbuhan dulu.

Pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan bagian penting dari pembangunan nasional dengan tujuan akhir, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang bisa diukur antara lain melalui tingkat pendapatan riil per kapita yang tinggi. Jadi, pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan riil masyarakat per kapita meningkat dalam jangka panjang (Tambunan, 1996). Secara umum pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan tingkat hidup dan menaikkan mutu hidup rakyat yang diukur dari tingkat pendapatannya. Suatu pemikiran yang antroposentris yang tidak memberikan nilai apa-apa terhadap alam dan lingkungan. Pernyataan yang dirasuki oleh teori ekonomi Rostow. Rostow merumuskan pemikiran yang sangat antroposentris dalam karya

besarnya yang berjudul “*The Stages of Economic Growth*”. Dalam buku itu Rostow menyatakan bahwa jika satu negara hendak mencapai pertumbuhan ekonomi yang otonom dan berkelanjutan, maka negara tersebut harus memiliki struktur ekonomi tertentu, yakni negara tersebut harus mampu melakukan mobilisasi seluruh kemampuan modal dan sumberdaya alamnya sehingga mampu mencapai tingkat investasi produktif sebesar 10% dari pendapatan nasional. Jika tidak, pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai tidak mampu mengimbangi pertumbuhan ekonomi (Suwarsono & A.Y So. 2000).

Masih menurut Rostow, bahwa pembangunan ekonomi berawal dari masyarakat tradisional sampai pada tahap masyarakat dengan konsumsi massa tinggi (Todaro, 1994).

Menurut teori Rostow, alam dan lingkungan hidup hanya sebagai alat dan sebagai obyek yang harus dieksploitasi secara maksimal dalam upaya mengejar angka-angka ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Saat ini, teori tersebut sedang diaplikasikan oleh negara-negara yang memiliki sumberdaya alam yang berlimpah seperti Indonesia. Kondisi ini dapat dilihat dari sejumlah keputusan pemerintah khususnya menteri Lingkungan Hidup, contoh: menyetujui hutan lindung untuk dieksplorasi atau bahkan dieksploitasi oleh beberapa perusahaan pertambangan yang “katanya” sudah terlanjur dikeluarkan ijinnya.

Mengambil keputusan dengan memilih menjadi negara industri yang sejajar dengan negara-negara maju yang memang hanya bisa mengembangkan sektor industrinya, ternyata telah memberikan nuansa laju pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Padahal tipologi negara kita bukan negara industri melainkan negara agraris.

Sektor industri kini terus bertumbuh pesat, tanpa memperhatikan konsekuensinya segala akibat negatif terhadap sumberdaya

alam dan lingkungan hidup. Beberapa kejadian yang telah terjadi di negara kita Indonesia akibat keputusan menjadikan ekonomi sebagai titik tumpuh kehidupan telah dimulai sejak tahun 70-an. Tonggak sejarah pencemaran, hasil kegiatan pembangunan ekonomi sudah dimulai sejak awal Pelita II, dimana saat itu tekanan

industri sudah demikian hebat terhadap lingkungan hidup di Indonesia dan sampai saat ini semakin dan semakin hebat saja tekanan terhadap sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dapat kita rasakan bersama (Tabel 1).

Tabel 1. Jenis industri yang tumbuh di Indonesia dan dampak negatif terhadap, alam, manusia dan lingkungan hidupnya sejak tahun 1970-an

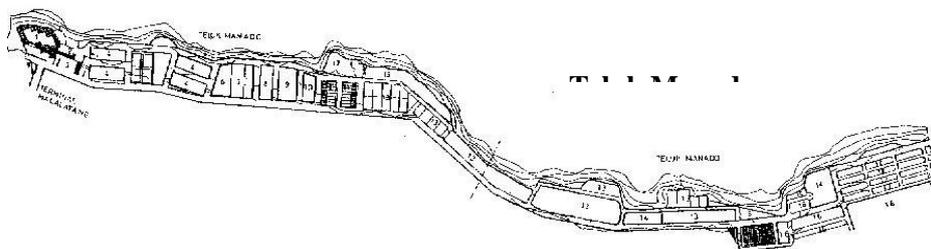
Tahun	Jenis Industri	Lokasi	Peristiwa
1970-an	Pabrik Logam PT. Inastu	Cimahi	Polusi suara dan debu timah hitam
1972	Pabrik Logam PT. Inastu	Cimahi	Polusi suara dan debu timah hitam
1975	Pabrik Gula Rendeng	Semarang	Polusi udara akibat carbon black
1976	Pabrik Ban PT. Intirub	Cililitan Jakarta	
1977	Pabrik Bumbu Miwon	Surabaya	Mencemari air Kali Mas
1979	Pabrik baterai everedy	Cimanggis, Jakarta Timur	Polusi merkuri pada air tanah, yang menyebabkan buruh sakit ginjal, karena minum air yang telah terkontaminasi dengan anorganik merkuri
1980	Pabrik Peleburan accu bekas	Tambun Bekasi	Mengakibatkan 13 orang bocah meninggal oleh asap pabrik ini

Sumber: Dimodifikasi dari buku Korban-korban Pembangunan (Aditjondro, G.J 2003)

Belum lagi banyak sekali keputusan-keputusan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan sangat berorientasi pada manusia sebagai makhluk yang boleh berbuat apa saja pada alam semesta yang sedang dan akan dilaksanakan di seluruh persada negeri ini. Dalam keputusan-keputusan tersebut, sumberdaya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH) hanyalah sebagai penghias suatu peraturan yang berorientasi pada pembangunan ekonomi. Atau dengan kata lain bahwa sumberdaya alam dan lingkungan hidup hanyalah dijadikan faktor

yang sangat kecil dalam rangkaian pertimbangan kemajuan suatu negara.

Kegagalan pemerintah dalam memainkan peran sebagai penjaga kepentingan bersama Pemerintah tidak hanya gagal menentukan model pembangunan, tetapi juga pemerintah gagal berperan sebagai penjaga kepentingan bersama, termasuk kepentingan akan lingkungan hidup. Perilaku pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan tidak mengandung prinsip keadilan, pemerintah tidak dapat memperlakukan dirinya masuk dalam sistem



Gambar 3. Salah satu blok kawasan komersil yang dibangun di kawasan sempadan pantai Teluk Manado

sosial sehingga dapat mengatur sistem itu agar memberikan dampak positif terhadap kelestarian lingkungan hidup. Prinsip keadilan yang masuk dalam prinsip etika, dalam hal ini membicarakan akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat untuk ikut menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian alam, dan ikut menikmati pemanfaatan sumberdaya alam atau alam semesta seluruhnya.

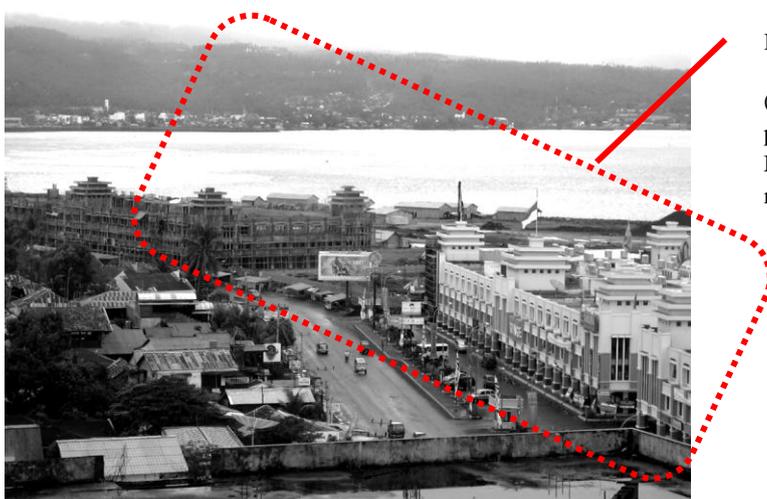
Namun, apa yang terjadi, hampir semua keputusan pemerintah dalam upaya mengelola lingkungan hidup, hanya untuk memberikan wadah bagi sektor ekonomi khususnya bagi investor. Sekali lagi, SDA dan LH hanyalah sebagai syarat dan tidak menjadi obyek yang penting untuk dipertimbangkan. Contoh kasus: di kota Manado, di mana kawasan sempadan pantai yang seharusnya dilindungi dan laut yang memiliki keindahan taman laut yang seharusnya dilindungi pula, malah ditimbun untuk dijadikan ruang daratan dan untuk dibangun kawasan komersil (perdagangan, hotel dan perkantoran). Konsep pemerintah yang membuat "*central business district*" yang tanpa memperhatikan alam (laut) serta tatanan sosial yang ada (komunitas nelayan)

Kini, kawasan tersebut telah dibangun dan masyarakat tidak memiliki akses lagi ke laut (milik bersama). Komunitas nelayan tergusur dan entah

pindah kemana. Pemerintah tidak kuasa menjaga alam yang menjadi hak bersama masyarakat (segala lapisan) di kota Manado. (Gambar 3 & Gambar 4). Pemerintah menyerahkan kepada kepentingan sekelompok orang (pelaku ekonomi) dan kepentingan masyarakatnya untuk mengakses sumberdaya alam tidak dapat leluasa dilakukan lagi. Hilangnya ekosistem perairan pantai menjadi daratan dengan model kegiatan moderen, menyebabkan rusaknya tatanan budaya (budaya nelayan) dan punahnya eksistensi mereka sebagai manusia. Pelaksanaan pembangunan ekonomi di daerah-daerah Indonesia seringkali terdengar berdalih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pendapatan asli daerah (PAD), sehingga masyarakat lokal menjadi korban untuk suatu pembangunan area komersil.

Kegagalan pemerintah dalam membangun suatu penyelenggaraan pemerintah yang baik

Dalam penyelenggaraan pemerintah RI, para pembuat keputusan, telah membuat rambu-rambu hukum dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Banyak sekali aturan-aturan hukum baik pada tingkatan Undang-undang sampai pada Peraturan Daerah. Semua itu dilakukan untuk dapat mengelola lingkungan hidup agar baik dan berlanjut.



Kawasan sempadan pantai

(kawasan lindung), dahulu tempat pemukiman nelayan tradisional Manado, masyarakat bebas mengakses laut Teluk Manado

Gambar 4. Kawasan Central Business District Manado

Peraturan-peraturan tersebut, ada juga yang bernuansakan etika biosentris dan ekosentris. Suatu pemikiran yang ideal. Namun apakah aturan-aturan ini dilaksanakan dengan baik? Terutama pada bagian pengawasan atau kontrol. Misalnya, negara kita RI telah memiliki Undang-undang tentang pelarangan mengimpor limbah bahan berbahaya dan beracun (B-3), namun apa yang terjadi, aturan-aturan diabaikan, sampah-sampah impor masuk ke negara RI. Semuanya adalah berorientasi pada ekonomi, negara pengekspor sampah B-3, justru membayar dengan harga tinggi kepada negara yang mau menerima sampahnya. Seperti pada pemberitaan Harian Kompas (Selasa, 25 November 1997) tentang *Sampah Impor tak Ada yang Bertanggung Jawab*, di mana Sampah impor plastik, sebagian tercemar B-3, yang sekarang menumpuk di Tanjungpriok menunggu penanggungjawabnya. Data dari Bapedal seperti yang diungkapkan Nugroho, ada 267 kontainer sampah plastik yang mengandung B-3 datang ke Indonesia, 134 kontainer di antaranya berada di Tanjungpriok. Sejauh ini sudah 142 kontainer direkspor oleh negara pengirim, termasuk 70 kontainer yang di Tanjung Priok. Sampah itu berasal dari berbagai negara di Eropa dan Asia, termasuk lima kontainer produk Jerman yang berangkat dari pelabuhan Jerman, meski pengeksportnya perusahaan dari Perancis.

Demikian pula, negara kita RI yang memiliki peraturan tentang limbah B-3, justru memberikan ijin bagi perusahaan-perusahaan asing khususnya pertambangan untuk membuang limbah B-3 (mengandung logam berat arsen dan merkuri, serta sianida) yang terkandung dalam tailing (sisa pengolahan emas) ke perairan laut (produktif), seperti PT. Newmont Minahasa Raya membuang tailingnya di Perairan Teluk Buyat Propinsi Sulawesi Utara, setiap hari 2000 ton.

Akibat dari tidak ketatnya pengawasan pemerintah RI khususnya

pemerintah daerah, maka PT. NMR semena-mena membuang limbah tailingnya ke zona perikanan produktif sehingga limbah arsen, merkuri dan sianida, kini terakumulasi pada ikan dan terkontaminasi pada darah masyarakat desa Pantai Teluk Buyat. Apa yang terjadi? SDA rusak dan kualitas hidup manusiapun terancam rusak pula. Walaupun pada akhirnya perusahaan ini harus henggang dari bumi Sulawesi Utara, namun tidak demikian saja penyelesaiannya. Pengawasan yang bermoral dan beretika dari pemerintah sangat diperlukan dalam upaya pemulihan kualitas lingkungan hidup di wilayah ini.

Demikian pula dengan pelaksanaan era otonomi yang baru digelar di Indonesia, sangat memberikan dampak yang tidak baik dalam pengelolaan lingkungan yang lintas wilayah ini. Akibat dari pemberian hak otonom suatu wilayah dan etika yang masih sangat antroposentris ini, banyak sekali keputusan-keputusan sepihak tanpa mengikut sertakan masyarakat telah diputuskan dan dilaksanakan. Walaupun keputusan itu harus merubah suatu keputusan terdahulu seperti Rencana Tata Ruang Wilayah dan demi untuk meningkatkan ekonomi, pemanfaatan ruang harus dipaksa dirobah berdasarkan kemauan pemilik modal, bukan berdasarkan pada kepemilikan bersama. Tidak ada prinsip demokrasi, dimana mempertimbangkan kepentingan orang banyak. Contoh konkrit yang terjadi di Minahasa pada tahun 2002, di mana Bupati Minahasa mengeluarkan surat keputusan penempatan lokasi pelabuhan kontainer di lokasi pariwisata dan kawasan lindung di perairan di kecamatan Pineleng, Minahasa, Sulawesi Utara. Padahal area ini diperuntukkan kawasan lindung dan kawasan wisata. Tentunya, sudah sedang dikembangkan pariwisata disana dan tentunya sudah memiliki komitmen bersama dengan pengusaha wisata dan masyarakat setempat.

Masih banyak lagi kasus-kasus pengrusakan lingkungan hidup akibat dari

penyimpangan terhadap berbagai ketentuan formal yang terjadi di bumi Indonesia yang membuat terus terdegradasi kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Indonesia.

PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan menjamin kondisi kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang baik pula. Lingkungan yang baik di mana terdapat kualitas sumberdaya alam yang baik akan menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Satu negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakatnya, harus menerapkan dulu prinsip-prinsip etika terhadap alamnya, agar alam dapat memberikan efek timbal balik terhadap manusia. Penyelenggaran pemerintah adalah salah satu media untuk menerapkan prinsip-prinsip etika dengan melalui aturan-aturan dan penataan aturan-aturan tersebut.

Hanya yang menjadi persoalan sekarang ini adalah untuk menjadi seorang penyelenggara pemerintah, tidak hanya memiliki cara pandang terhadap alam dan lingkungan hidup secara individual (biosentris, ekosentri dan ekofeminisme) yang mengandung prinsip; (1) hormat terhadap alam (*respect for nature*); (2) tanggung jawab moral; (3) solidaritas kosmis; (4) kasih sayang & kepedulian terhadap alam; (5) tidak mengancam eksistensi makhluk hidup lain di alam semesta (*No Harm*); (6) hidup sederhana dan selaras dengan alam. Tetapi juga seorang penyelenggara negara harus memiliki etika publik yang mengandung prinsip; (1) keadilan; (2) demokrasi; serta (3) integritas moral.

Penyelenggara negara sebetulnya adalah wakil Tuhan di bumi ini, yang artinya bahwa penyelenggara negara yang harus menjadi panutan karena caranya membuat aturan-aturannya dan caranya menaati aturan-aturan tersebut tanpa kompromi, namun bijaksana dan pro pada kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, G.J. 2003. Korban-korban Pembangunan Tilikan terhadap beberapa kasus Perusakan Lingkungan di Tanah Air. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Anonimous. 1993. Kependudukan dan Lingkungan Hidup Melalui Jalur Agama Katolik. Kerjasama Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dan Departemen Agama R.I. Jakarta.
- Desjardins, J.R. 1992. Environmental Ethics An Introduction to Environmental Philosophy. Wadsworth Publishing Company. Belmont California..
- Keraf, S.A. 2002. Etika Lingkungan. Penerbit Buku Kompas.
- Miller, T.G. Jr. 1996. Living in the Environment. Wadsworth Publishing Company A Division of International Thomson Publishing Inc. United State of Amarica
- Suwarsono & A.Y So. 2000. Perubahan Sosial dan Pembangunan. LP3S.
- Tambunan, T.T.H. 1996. Perekonomian Indonesia. Ghalia Indonesia. 264 hal.
- Todaro. M.P. 1994. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Penerbit Erlangga. Jakarta. 87 hal.

ISSN 1412-3487